

Manajemen Risiko Bencana Banjir di Kota Cirebon

Mohammad Rivaldy^{1*}, Sobar Sutisna¹, Robertus Anugerah Purwoko Putro¹, dan Syamsul Maarif¹

¹ Program Studi Magister Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received June 10, 2025

Revised July1, 2025

Accepted August27, 2025

Available online December 1, 2025

*Corresponding author email:
st.rivaldy@gmail.com

Keywords:

Flood, Disaster, Cirebon,
Management, Risk

Abstract

In recent years, Cirebon City has experienced an increasing trend in the frequency and intensity of flood events. As a result, the community has experienced large material and immaterial losses, as well as disruption of economic and social activities. This condition requires a response strategy and measurable in disaster management. This study aims to analyze the implementation of flood disaster risk management that has been carried out by the Cirebon City Regional Government. By combining interactive data analysis and a descriptive approach, this study shows that the Cirebon City Regional Disaster Management Agency plays an important role in reducing the risk of flood disasters in urban areas, which are divided into three stages: prevention, mitigation, and preparedness. Although efforts to reduce the risk of flood disasters continue to be made, this study emphasizes the importance of evaluating and improving the sustainability of policies, programs, activities, and sub-activities that have been designed. This periodic review needs to be carried out to ensure that the performance of the indicators that have been set can be achieved optimally, so that Cirebon City can be more resilient in facing future flood disasters.

DOI: 10.21154/joipad.v5i2.11110
Page: 17-29

JOIPAD with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)

PENDAHULUAN

Banjir merupakan peristiwa meluapnya air atau genangan air hujan ataupun rob yang melampaui kapasitas sungai dan/atau drainase, sehingga merendam wilayah permukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya. Banjir biasanya diakibatkan oleh curah hujan tinggi (banjir sungai/drainase), pasang air laut (banjir rob), terbandungnya aliran sungai (banjir bandang), atau kombinasi ketiganya, yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial bagi masyarakat.

Banjir masih menjadi salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa ribuan kejadian banjir melanda berbagai wilayah di tanah air setiap tahunnya. Tentunya, banjir ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar, tidak terkecuali di Kota Cirebon, sebuah kota strategis di pesisir utara Jawa. Curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang kurang memadai, kenaikan muka air laut, merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kota ini memiliki risiko tinggi terhadap banjir.

Kota Cirebon dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian banjir. Kondisi ini mengakibatkan kerugian material dan imaterial yang signifikan bagi masyarakat, serta mengganggu aktivitas perekonomian dan sosial. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon Tahun 2017-2024, banjir di Kota Cirebon diperkirakan berdampak pada ribuan warga dengan kerugian yang diperkirakan ratusan juta-miliaran rupiah. Hal ini menjadi cerminan bahwa manajemen risiko bencana banjir di Kota Cirebon perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatifnya.

Manajemen risiko bencana adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Manajemen risiko bencana mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap pra bencana dengan tujuan untuk mencegah, mengurangi, dan mengelola risiko yang ditimbulkan. Manajemen risiko bencana di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta peraturan-peraturan lain dalam berbagai tingkat administrasi wilayah (provinsi, kabupaten, dan/atau kota).

Manajemen risiko bencana dapat diartikan juga sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko bencana. Serangkaian kegiatan tersebut diantaranya adalah identifikasi risiko bencana, analisis risiko bencana, evaluasi risiko bencana, dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana berdasarkan evaluasi yang dibuat.

Definisi manajemen risiko bencana seringkali dikaitkan dengan pengurangan risiko bencana (Mamuji & Etkin, 2019; Rajabi et al., 2021; Sari et al., 2024). Hal ini terjadi karena pengurangan risiko bencana merupakan tujuan utama dilaksanakannya manajemen risiko bencana. Dalam UU No. 24 Tahun 2007, pengurangan risiko bencana terdiri dari pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, serta penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan

Mohammad Rivaldy, Sobar Sutisna, Robertus Anugerah Purwoko Putro, dan Syamsul Maarif
penanggulangan bencana.

Manajemen risiko bencana banjir di Kota Cirebon perlu dilakukan agar risiko banjir di Kota Cirebon yang selama ini ada dan yang akan datang dapat dihindari, dicegah, dikurangi, dialihkan, diantisipasi, bahkan dihilangkan. Manajemen risiko bencana seyogyanya menjadi rutinitas, selalu diperbarui, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko bencana banjir di Kota Cirebon dan memberikan rekomendasi terkait upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan selama ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu keadaan secara objektif, komprehensif, dan mendalam tentang suatu fenomena atau peristiwa pada suatu periode tertentu. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Hal ini dilakukan untuk mendalami secara rinci mengenai manajemen risiko bencana banjir di Kota Cirebon, termasuk aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Subyek dalam penelitian ini adalah BPBD Kota Cirebon dengan obyek penelitian yang diteliti yaitu kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, dan dokumen kebencanaan.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik observasi partisipatif, dimana peneliti menjadi bagian dari kelompok yang diamati untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Data yang diperoleh kemudian diolah agar diperoleh informasi yang bermakna sesuai tujuan penelitian dengan teknik triangulasi-narasi. Setelah data dikumpulkan, data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Teknik analisis ini terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Operasionalisasi konsep manajemen risiko bencana banjir menggunakan pendekatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37 UU No. 24 Tahun 2007 dan diringkas oleh penulis menjadi tiga tahapan yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1. Pencegahan

BPBD Kota Cirebon telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan bencana banjir. Upaya pencegahan tersebut diantaranya dengan melakukan pengenalan dan pemantauan risiko bencana melalui Kajian Risiko Bencana (KRB), perencanaan partisipatif penanggulangan bencana melalui Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), pengembangan budaya sadar bencana melalui Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana), dan peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana melalui pengelolaan risiko bencana dunia usaha (Gambar 1).

a. KRB

BPBD Kota Cirebon memiliki Kajian Risiko Bencana (KRB) yang diperbarui pada tahun 2023. KRB disusun dengan melibatkan berbagai pihak. Dokumen ini memberikan gambaran

Mohammad Rivaldy, Sobar Sutisna, Robertus Anugerah Purwoko Putro, dan Syamsul Maarif terkait risiko bencana di Kota Cirebon, termasuk banjir, beserta rekomendasi penanganannya. KRB yang telah disusun senantiasa dipantau dan dievaluasi apakah ada perubahan terhadap bahaya, kerentanan, maupun kapasitas daerah. Indeks Ketahanan Daerah yang menjadi bagian dari kapasitas dan bahasan dalam kajian tersebut senantiasa diamati dan diukur setiap tahunnya. Pemantauan risiko bencana dilakukan untuk mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi secara dini sehingga tindakan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan tepat waktu.

b. RPB

BPBD Kota Cirebon memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang diperbarui pada tahun 2024. RPB disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dokumen ini mencakup informasi tentang karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah, upaya penanggulangan, dan rencana aksi, dengan prioritas pada penanganan banjir. RPB berfungsi sebagai pedoman koordinasi dan masukan untuk perencanaan pembangunan daerah, serta dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

c. Keltana

BPBD Kota Cirebon telah membentuk 11 Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) pada tahun 2022-2024, dimana 10 dari 11 kelurahan memiliki risiko bencana prioritas banjir. 10 kelurahan tersebut diantaranya Kalijaga, Kesepuhan, Pekiringan, Sukapura, Kecapi, Larangan, Drajat, Pegambiran, Lemahwungkuk, dan Jagasatru. Anggota-anggota Keltana terdiri dari berbagai unsur masyarakat baik itu ketua RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain. Keltana dibentuk untuk melindungi serta meningkatkan peran dan kapasitas kelembagaan masyarakat sekitar kawasan rawan bencana. Kinerja Keltana secara rutin dipantau dan dievaluasi sesuai dengan standar dalam Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012.

d. Pengelolaan Risiko Bencana

BPBD Kota Cirebon secara rutin melakukan survei lokasi penyimpanan limbah B3 sejak 2021. Survei ini bertujuan untuk menilai tingkatan risiko bencana limbah B3 yang menjadi bagian dari proses persetujuan lingkungan para pelaku usaha. Hasil survei didokumentasikan dalam surat keterangan potensi bencana, yang mencakup informasi tentang tingkat risiko, himbauan penanggulangan bencana, K3, PLB3, dan peta potensi bencana.



Gambar 1. Upaya pencegahan bencana banjir yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Cirebon

1.2. Mitigasi

BPBD Kota Cirebon telah melakukan berbagai upaya dalam mitigasi bencana banjir. Upaya mitigasi tersebut diantaranya dengan melakukan penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana melalui pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB), pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, serta pelatihan keluarga tanggap bencana alam (Gambar 2).

a. TRC-PB

Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah membentuk TRC-PB tingkat kota sejak tahun 2021 dimana BPBD bertindak sebagai inisiator. TRC-PB ini terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian, serta memberikan dukungan pendampingan (membantu BPBD) dalam penanganan darurat bencana.

b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Setiap tahun, BPBD Kota Cirebon memberikan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Jenis bencana yang dilatih dapat berupa bencana alam maupun non alam, termasuk didalamnya ialah banjir. Peserta pelatihan terdiri dari berbagai kalangan, baik itu masyarakat di tingkat RT/RW, guru dan siswa/i sekolah tingkat SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi, kader PKK, warga binaan P2WKSS, dunia usaha, media, instansi pemerintahan, dll.

c. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

BPBD Kota Cirebon senantiasa memberikan pelatihan kebencanaan kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon termasuk pelatihan keluarga tanggap bencana alam sejak tahun 2021. Hal ini selaras dengan program TP PKK Pusat Kemendagri yaitu Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB). GKSTTB dilaksanakan oleh kader PKK, kader dasawisma, pemerintah dan masyarakat kelurahan, serta dinas/badan terkait. GKSTTB dilaksanakan melalui sembilan pilot project, dimana salah satu projectnya adalah Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Alam.



Gambar 2. Upaya mitigasi bencana banjir yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Cirebon

1.3. Kesiapsiagaan

BPBD Kota Cirebon telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir. Upaya kesiapsiagaan tersebut diantaranya dengan melakukan penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana melalui Rencana

Mohammad Rivaldy, Sobar Sutisna, Robertus Anugerah Purwoko Putro, dan Syamsul Maarif

Kontijensi (Renkon), apel dan geladi kesiapsiagaan, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bagi warga negara dan petugas, serta sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana (Gambar 3).

a. Renkon

BPBD Kota Cirebon telah menyusun Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Banjir 2024. Renkon ini merupakan panduan penanganan darurat banjir yang melibatkan berbagai pihak (multihelix). Tujuannya adalah untuk menanggulangi bencana secara efektif dengan mengerahkan seluruh sumber daya. Renkon ini terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan risiko dan kondisi lapangan yang terjadi di Kota Cirebon.

b. Apel dan Geladi Kesiapsiagaan

BPBD Kota Cirebon telah melaksanakan apel dan geladi kesiapsiagaan bencana banjir tingkat kota pada tahun 2024. Apel dan geladi ini pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon sejak BPBD dibentuk. Peserta apel dan geladi terdiri dari berbagai kalangan, baik itu masyarakat di tingkat RT/RW, guru dan siswa/i sekolah tingkat SD/SMA/Perguruan Tinggi, dunia usaha, media, instansi pemerintahan, dll.

c. Pusdalops

BPBD Kota Cirebon telah memiliki Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) sejak tahun 2017 ketika BPBD pertama kali dibentuk. Pusdalops merupakan unsur pelaksana BPBD yang bertugas menjamin terlaksananya operasi penanganan darurat bencana secara optimal dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada. Pusdalops diberikan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana, baik di posko, pos lapangan, maupun bagi petugas yang melakukan operasi penanggulangan bencana.

d. Peralatan dan Perlindungan Kesiapsiagaan

BPBD Kota Cirebon untuk pertama kalinya pada tahun 2024 memberikan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana banjir kepada warga dan petugas di seluruh kecamatan. Peralatan seperti helm SAR, jas hujan, gerobak dorong fiber, pelampung, dan rompi. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

e. KIE

Setiap tahun, BPBD Kota Cirebon senantiasa memberikan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana kepada masyarakat Kota Cirebon. Bencana yang sosialisasikan bisa bencana alam maupun non alam, termasuk didalamnya ialah banjir. KIE dilaksanakan dalam berbagai bentuk, baik itu lisan maupun tulisan, seperti sosialisasi tatap muka, poster, pamflet, brosur, sticker, media sosial, media elektronik, media cetak, rambu bencana, papan informasi bencana, serta rambu evakuasi bencana.



Gambar 3. Upaya kesiapsiagaan bencana banjir yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Cirebon

2. Pembahasan

2.1. Pencegahan

Pemerintah Kota Cirebon telah menunjukkan keseriusan dalam mengurangi risiko banjir dengan menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen-dokumen yang telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak dan mengikuti aturan nasional ini menjadi dasar bagi Kota Cirebon untuk mengambil langkah-langkah pencegahan bencana banjir.

Pemerintah Kota Cirebon telah melegalisasi KRB pada tahun 2024 dan akan melegalisasi RPB pada tahun 2025 melalui Peraturan Wali Kota. Legalisasi ini bertujuan untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan KRB dan RPB, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana banjir, serta mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Keberadaan KRB dan RPB menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah dalam membangun ketangguhan bencana di Kota Cirebon. Pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas upaya penanggulangan bencana. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kendala implementasi dan meningkatkan pelaksanaan program dalam dokumen tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat juga krusial agar upaya pencegahan bencana banjir dapat berjalan optimal.

Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kota Cirebon merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, khususnya banjir. Melalui legalisasi SK Lurah, Keltana memiliki dasar hukum yang kuat dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun budaya sadar bencana. Fokus pada risiko banjir mencerminkan pemahaman dalam konteks kearifan lokal. Namun, efektivitas Keltana perlu dievaluasi lebih lanjut, dan keberlanjutannya memerlukan dukungan pemerintah serta masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon secara aktif mengembangkan budaya sadar bencana dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui program-program seperti Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Satuan

Mohammad Rivaldy, Sobar Sutisna, Robertus Anugerah Purwoko Putro, dan Syamsul Maarif Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dan Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB). BPBD Kota Cirebon memfasilitasi pembentukan Kencana di seluruh kecamatan untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dan mengoptimalkan peran kecamatan dalam penanggulangan bencana. Selain itu, FPRB dibentuk sebagai wadah kolaborasi stakeholder terkait di tingkat kota untuk bersama-sama dalam mengurangi risiko bencana. Terkait SPAB dan RSAB, SMPN 18 Kota Cirebon dan RSUD Medimas Kota Cirebon menjadi pelopor dalam pelaksanaan program tersebut, yang bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, dan tenaga medis dari risiko bencana, serta menjamin keberlangsungan layanan pendidikan dan fungsi rumah sakit sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi.

BPBD Kota Cirebon secara proaktif melakukan survei lokasi penyimpanan limbah B3 bagi para pelaku usaha. Kegiatan ini berpedoman pada PP Nomor 22 Tahun 2021 dan PP Nomor 21 Tahun 2008. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bencana seperti banjir dan kerawanan alam serta memberikan informasi penting untuk pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja. Hasil survei dituangkan dalam surat keterangan potensi bencana beserta peta. Langkah ini krusial dalam pengurangan risiko bencana, memungkinkan pelaku usaha mengambil tindakan preventif untuk meminimalkan dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan dan masyarakat.

Terkait upaya pengurangan risiko bencana, selain yang telah dijelaskan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon juga senantiasa berupaya dalam pelaksanaan penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan berdasarkan risiko bencana sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007. Upaya tersebut ditunjukkan dengan adanya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun 2022-2042, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 di Kota Cirebon berbasis mitigasi bencana, termasuk banjir. Dokumen-dokumen tersebut disusun oleh berbagai stakeholder (multihelix), dimana BPBD menjadi salah satu unsur pendukung dalam penyusunannya.

2.2. Mitigasi

Kota Cirebon memperkuat mitigasi bencana dengan membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) tingkat kota. Tim yang melibatkan berbagai instansi dan berstandar nasional ini bertugas memberikan respon cepat saat bencana, mulai dari kaji cepat hingga dukungan logistik. Legalisasi melalui Keputusan Wali Kota menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penerapan upaya non fisik penanggulangan bencana, sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007. TRC-PB juga melakukan kegiatan mitigasi fisik seperti pembuatan sumur resapan, membangun jalur evakuasi, perkuatan tanggul sungai, normalisasi sungai, penanaman pohon bakau, pengaturan tata ruang aman bencana, dll. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas TRC-PB dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja tim di masa mendatang.

Pemerintah Kota Cirebon, melalui BPBD, secara rutin mengadakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi masyarakat, mencakup berbagai jenis bencana alam dan non-alam. Program pelatihan yang terstruktur, sistematis, dan dianggarkan setiap tahun ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana sesuai UU

Mohammad Rivaldy, Sobar Sutisna, Robertus Anugerah Purwoko Putro, dan Syamsul Maarif
Nomor 24 Tahun 2007. Selain itu, BPBD juga terlibat dalam program Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) untuk meningkatkan mitigasi bencana di tingkat keluarga. Untuk meningkatkan efektivitas, evaluasi pelatihan dan identifikasi kebutuhan pelatihan spesifik bagi setiap kelompok masyarakat perlu dilakukan, sehingga Kota Cirebon dapat lebih tangguh dalam menghadapi berbagai bencana, termasuk banjir yang terjadi setiap tahun.

2.3. Kesiapsiagaan

Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir dengan menyusun Rencana Kontijensi (Renkon) yang komprehensif. Renkon, yang disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mengacu pada standar nasional, menjadi pedoman tindakan nyata dalam menghadapi bencana. Legalisasi Renkon melalui Peraturan Wali Kota memberikan kekuatan hukum yang kuat, membuktikan komitmen pemerintah dalam penerapan upaya non-fisik penanggulangan bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007. Evaluasi berkala dan simulasi bencana perlu terus dilakukan untuk memastikan Renkon tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika bencana yang terus berubah.

Apel dan geladi kesiapsiagaan bencana banjir di Kota Cirebon merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak dan mengacu pada standar nasional, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko bencana serta memperkuat koordinasi antar instansi. Pemerintah Daerah Kota Cirebon berkomitmen untuk melaksanakan apel dan geladi ini secara rutin setiap tahun, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas apel dan geladi dapat meningkatkan kesiapsiagaan semua pihak yang terlibat dalam menghadapi banjir di masa depan.

Pusdalops BPBD Kota Cirebon berperan penting dalam penanggulangan bencana, yang diwujudkan melalui legalisasi dan penerapan sistem peringatan dini, penyediaan kebutuhan dasar, serta penyusunan data dan prosedur tanggap darurat sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007. Keberadaan Pusdalops meningkatkan efektivitas koordinasi penanganan darurat bencana. Evaluasi berkala dan pelibatan aktif masyarakat diperlukan untuk memastikan relevansi dan optimalisasi kinerja Pusdalops dalam menghadapi perkembangan situasi, termasuk bencana banjir.

BPBD Kota Cirebon secara aktif meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, dengan menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini, yang direncanakan berlanjut pada tahun 2025, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007. Untuk optimalisasi, evaluasi berkala peralatan, pelatihan pengguna, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan.

BPBD Kota Cirebon secara rutin melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media dan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun

Mohammad Rivaldy, Sobar Sutisna, Robertus Anugerah Purwoko Putro, dan Syamsul Maarif

2007. Anggaran untuk KIE selalu dialokasikan setiap tahun, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Namun, efektivitas KIE perlu dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitasnya, seperti penyesuaian materi dengan karakteristik masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Dokumen-dokumen kebencanaan seperti KRB, RPB, dan Renkon yang telah dibuat pada tahun 2023 dan 2024 serta Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cirebon menjadi kesempatan bagi stakeholder kebencanaan untuk memadukan/mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah/RPJMD pasca Pilkada Tahun 2024. Hal ini merupakan langkah krusial untuk memastikan upaya penanggulangan bencana terintegrasi dengan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dengan menyelaraskan KRB, RPB, dan Renkon dengan RPJMD, Renstra PD, RK Pemerintah Daerah, RKPD, RTRW, dan RDTR, pemerintah daerah dapat memastikan alokasi anggaran yang efektif, koordinasi lintas sektor yang optimal, serta program-program berbasis pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan. Kepala daerah berperan penting dalam mewujudkan integrasi ini melalui komitmen politik yang kuat, sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, dan kerjasama dengan berbagai pihak, terlebih bagi kepala daerah terpilih yang telah berjanji dalam kampanyenya untuk menanggulangi banjir tahunan di Kota Cirebon.

Beberapa upaya manajemen risiko bencana yang telah dilakukan di Kota Cirebon turut berkontribusi dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain diadopsi dalam dokumen-dokumen dan pelaksanaan pembangunan daerah, manajemen risiko bencana yang telah dilakukan juga telah meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Cirebon dan menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Cirebon. Tentunya, indeks-indeks ini bukan hanya sekedar angka, namun ia juga merupakan indikator telah terlaksananya upaya untuk mengurangi dampak-dampak negatif bencana yang ada, termasuk bencana banjir yang sering melanda Kota Cirebon.



Gambar 4. Ringkasan Manajemen Risiko Bencana Banjir di Kota Cirebon Tahun 2024

KESIMPULAN

Banjir di Kota Cirebon merupakan masalah serius dan semakin sering terjadi. Beberapa faktor seperti curah hujan tinggi, sistem drainase buruk, dan kenaikan permukaan

Mohammad Rivaldy, Sobar Sutisna, Robertus Anugerah Purwoko Putro, dan Syamsul Maarif

laut membuat Kota Cirebon rentan terhadap banjir. Akibatnya, masyarakat mengalami kerugian material dan imaterial yang besar. Untuk mengatasi masalah ini, BPBD Kota Cirebon berperan penting dalam manajemen risiko bencana banjir melalui tiga tahapan: pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam mengurangi risiko bencana di Kota Cirebon. Pembangunan di Kota Cirebon beberapa tahun terakhir telah dirancang dengan mempertimbangkan potensi bencana banjir dan upaya untuk mengurangi risiko tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat. Pemerintah tidak hanya bereaksi saat terjadi bencana, tetapi juga proaktif dalam mencegah, memitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder kebencanaan yang ada.

Upaya pengurangan risiko bencana banjir merupakan proses yang berkelanjutan. Evaluasi dan perbaikan secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program yang telah dilaksanakan. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, Kota Cirebon dapat menjadi kota yang tangguh dalam menghadapi potensi bencana banjir di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon, dan seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini. Tanpa dukungan beasiswa dan izin yang diberikan, keberhasilan publikasi artikel ini tidak akan tercapai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para editor dan reviewer IJED UNS, atas waktu, dedikasi, serta masukannya dalam penyempurnaan artikel ilmiah ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kebencanaan.

REFERENSI

BNPB. (2024). *Infografis Bencana Tahun 2020-2024*. Jakarta.

BPBD Kota Cirebon. (2023). *Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Cirebon Tahun 2023-2027*. Cirebon.

BPBD Kota Cirebon. (2024). *Dokumen Rencana Kontijensi Kota Cirebon Tahun 2024*. Cirebon.

BPBD Kota Cirebon. (2024). *Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2028*. Cirebon.

BPBD Kota Cirebon. (2024). *Laporan Kejadian Bencana di Kota Cirebon Tahun 2017-2024*. Cirebon.

Mamuji, A. & Etkin, D. (2019). Disaster Risk Analysis Part 2: The Systemic Underestimation of Risk. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 16(1), 20170006. <https://doi.org/10.1515/jhsem-2017-0006>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third edition.)*. SAGE Publications, Inc.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rajabi, E., Bazayr, J., Delshad, V., & Khankeh, H. R. (2022). The Evolution of Disaster Risk

Mohammad Rivaldy, Sobar Sutisna, Robertus Anugerah Purwoko Putro, dan Syamsul Maarif

Management: Historical Approach. *Disaster medicine and public health preparedness*, 16(4), 1623–1627. <https://doi.org/10.1017/dmp.2021.194>

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sari, N. M., Wahyuni, P., Nugroho, A. R. B., Prasetya, J. D., & Lestari, P. (2024). Motivasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat. (2024). *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 3(2), 70-77. <https://doi.org/10.20961/4z0cq553>